

## BAB II

### DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### 2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan suatu basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Prinsip utama teori ini menjelaskan hubungan antara *principals* dengan *agents*. Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak dimana satu atau lebih pihak (*principals*) melibatkan pihak lain (*agents*) untuk melakukan beberapa layanan atas nama prinsipals. Dalam hal ini yang dimaksud dengan prinsipals adalah pihak yang memberi perintah atau pemegang saham (investor), sedangkan yang dimaksud dengan *agents* adalah manajemen perusahaan yang bertugas mengelola sumber daya perusahaan yang dipercayakan *principals* kepada mereka.

Lebih lanjut, teori agensi juga menjelaskan tentang hubungan kontraktual antara pihak *agents* dan *principals*. Namun, dalam kenyataannya hubungan kontraktual antara *agents* dan *principals* tidak selamanya berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Manajer (*agents*) sebagai pihak yang diberi kepercayaan dan tanggungjawab untuk mengelola atas operasional perusahaan memiliki informasi lebih banyak dan lebih *up to date* mengenai kondisi internal dan prospek perusahaan di masa depan dibandingkan dengan pemegang saham (*principals*), kondisi tersebut dikenal sebagai asimetri informasi (*information asymmetry*). Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Karena perbedaan kepentingan tersebut, masing-

masing pihak berusaha memperbesar keuntungan bagi dirinya sendiri. Manajer yang mengetahui informasi perusahaan lebih banyak dibanding pemegang saham akan memungkinkannya untuk melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri serta merugikan pihak lain (Jensen dan Meckling, 1976).

Salah satu cara yang digunakan dalam mengatasi masalah kontrak dan mengurangi sifat oportunistik manajer adalah dengan menggunakan tata kelola perusahaan (*corporate governance*). *Corporate governance* merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, dengan adanya tata kelola yang baik yang diterapkan oleh perusahaan diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. *Corporate governance* juga berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa para manajer akan memberikan keuntungan kepada investor melalui peningkatan kemakmuran pemegang saham yang tercermin dari harga sahamnya. Selain itu, mekanisme *corporate governance* juga dapat memberikan keyakinan bahwa manajer tidak akan mencuri atau menggelapkan dana yang ditanamkan oleh investor sehingga akan menjamin kelangsungan investasi para pemegang saham.

## 2.2 Teori Legitimasi

Teori legitimasi menyatakan bahwa, organisasi secara terus menerus mencoba untuk memastikan bahwa kegiatan operasinya diterima sesuai dengan batasan dan norma oleh masyarakat, sehingga mereka mencoba untuk meyakinkan bahwa aktivitasnya diterima oleh pihak luar (Deegan dan Unerman, 2006). Hal ini

berarti bahwa, keberadaan organisasi akan dapat berlanjut apabila sistem nilai yang digunakan untuk menjalankan kegiatan operasinya sesuai dengan sistem nilai yang dimiliki masyarakat. Kegagalan organisasi dalam memenuhi kontrak sosial, akan menjadikan sebuah ancaman bagi keberlanjutan usaha (*going concern*) organisasi tersebut. Ancaman tersebut dapat berupa pemboikotan produk, pembatasan sumber daya (tenaga kerja, bahan baku, modal keuangan), bahkan hingga pencabutan ijin usaha. Jika organisasi mampu memenuhi kontrak sosial tersebut, maka keberadaan organisasi akan direspon positif oleh masyarakat.

Teori legitimasi menjelaskan kontrak sosial organisasi dengan masyarakat, dengan begitu kelangsungan hidup sebuah perusahaan akan terancam jika masyarakat merasa organisasi telah melanggar kontrak sosialnya. Apabila masyarakat merasa tidak puas terhadap operasi organisasi secara sah (*legitimate*) maka masyarakat dapat mencabut kontrak sosial dalam operasi organisasi tersebut (Deegan dan Unerman, 2006). Teori legitimasi sangat bermanfaat dalam menganalisis perilaku organisasi “Karena legitimasi adalah hal yang penting bagi organisasi, batasan-batasan yang ditentukan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan” Dowling dan Preffer dalam dalam (Ghozali dan Chariri 2007). Pengungkapan tanggung jawab sosial dilakukan perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat dimana perusahaan berada. Legitimasi ini mengamankan perusahaan dari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat meningkatkan nilai perusahaan tersebut. Teori legitimasi juga menyatakan bahwa organisasi bukan hanya memperhatikan hak-hak investor tetapi

juga memperhatikan hak publik (Deegan dan Unerman, 2006). Perusahaan akan memastikan bahwa mereka akan beroperasi sesuai dengan norma yang ada dalam masyarakat dan lingkungan diterima oleh pihak luar sebagai sesuatu yang sah (Deegan dan Unerman, 2006).

### 2.3 Tata Kelola Perusahaan

Dari berbagai definisi yang ditemukan, Respati dan Yusniar (2014) menyimpulkan bahwa *corporate governance* merupakan: 1) Suatu struktur yang mengatur pola hubungan yang harmonis tentang peran dewan komisaris, direksi, RUPS dan para *stakeholder* lainnya, 2) Suatu sistem *check and balance* mencakup perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang : pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan, dan 3) Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian dan pengukuran kinerjanya. Dalam Penelitian ini, tata kelola perusahaan diprosikan dengan ukuran komite audit dan proporsi dewan komisaris independen. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan terdiri dari:

1. Transparansi (*Transparency*), untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.
2. Akuntabilitas (*Accountability*), perusahaan harus mampu untuk bertanggungjawab atas kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

3. *Responsibilitas (Responsibility)*, perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang.
4. *Independensi (Independency)*, untuk melancarkan prinsip GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing bagian dalam perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
5. *Kewajaran dan kesetaraan (fairness)*, dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

#### **2.4 Kinerja Lingkungan**

Pengertian kinerja menurut Indra Bastian (2006:274) adalah gambaran pencapaian pelaksanaan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi suatu organisasi. Kinerja lingkungan adalah bagaimana kinerja perusahaan untuk ikut andil dalam melestarikan lingkungan. Perusahaan memberikan perhatian terhadap lingkungan sebagai wujud tanggung jawab dan kepeduliannya terhadap lingkungan. Di Indonesia, kinerja lingkungan dapat diukur dengan menggunakan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) yang diadakan oleh kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Program ini merupakan salah program keunggulan Kementerian Lingkungan Hidup dalam pemberian insentif dan atau disintensif

kepada penanggung jawab usaha dan kegiatan. Tujuan diadakannya program ini agar perusahaan terdorong untuk menaati peraturan lingkungan hidup dan mencapai keunggulan lingkungan. Terdapat 5 warna yang menggambarkan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup, antara lain:

EMAS	Telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan ( <i>environmental excellency</i> ) dalam proses produksi dan/atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat
HIJAU	Telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan ( <i>beyond compliance</i> ) melalui upaya 4R ( <i>Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery</i> ), dan melakukan upaya tanggung jawab sosial ( <i>CSR/Comdev</i> )
BIRU	Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku
MERAH	Upaya pengelolaan lingkungan hidup dilakukan tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
HITAM	Diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau tidak melaksanakan sanksi administrasi

Sumber : <https://proper.menlhk.go.id/proper/>

**Gambar 2. 1 ASPEK PENILAIAN PERINGKAT PROPER**

## 2.5 Kinerja Keuangan

Konsep kinerja keuangan menurut Indriyo Gitosudarmo dan Basri (2002:275) adalah rangkaian aktivitas keuangan pada suatu periode tertentu yang dilaporkan dalam laporan keuangan diantaranya laporan laba rugi dan neraca. Menurut Irhan Fahmi (2011:2) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

Kinerja keuangan dalam penelitian ini diproksikan dengan Return On Asset (ROA) karena dapat menunjukkan bagaimana kinerja perusahaan dilihat dari

penggunaan keseluruhan asset yang dimiliki oleh perusahaan dalam menghasilkan keuntungan Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan.

## **2.6 Manfaat Penilaian Kinerja**

Adapun manfaat dari penilaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya
2. Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang
3. Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya

## **2.7 Penelitian Terdahulu**

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya terdahulu berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut yaitu:

1. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Indira Januarti dan Dina Apriyanti (2005) tentang pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kinerja keuangan dengan variabel-variabel penelitian adalah biaya sosial

sebagai variabel independen yang berupa biaya kesejahteraan karyawan dan biaya untuk komunitas dan variabel dependen yang berupa kinerja keuangan yang berupa kinerja aktivitas dan kinerja profitabilitas. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa variabel biaya sosial berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja profitabilitas dan kinerja aktivitas

2. Dalam penelitian yang di lakukan oleh Rakhhiemah (2009) tentang pengaruh kinerja lingkungan terhadap CSR dan kinerja finansial menunjukan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh terhadap CSR. Namun kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap kinerja finansial, begitu juga dengan CSR
3. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rachmaniar 2019 tentang pengaruh tata kelola perusahaan terhadap kinerja keuangan dan kinerja saham pada indeks saham LQ45, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan tidak berpengaruh nyata dan bersifat positif terhadap Kinerja Keuangan maupun Kinerja Saham.

## **2.8 Pengembangan Hipotesis**

### **2.8.1 Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Kinerja Lingkungan Perusahaan**

#### **1. Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan**

Gagasan dasar dalam menentukan komite audit adalah untuk memberdayakan fungsi komisaris dalam melakukan pengawasan. Dalam penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) BEI mewajibkan seluruh perusahaan yang tercatat wajib memiliki



komite audit. Anggota komite audit sekurang-kurangnya 3 anggota, seorang diantaranya komisaris independen perusahaan sekaligus menjadi ketua komite, sedangkan pihak lain adalah pihak ekstern yang independen dan minimal salah satu memiliki kemampuan dibidang keuangan dan akuntansi. Penelitian Sekaredi (2011) menunjukkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dengan semakin banyaknya anggota komite audit, maka dapat meningkatkan efektivitas komite audit sehingga dapat mencegah praktik manajemen laba yang dilakukan manajemen. Efektifnya fungsi pengawasan juga dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis berikut:

**H1 : Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.**

## **2. Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan**

Dalam teori keagenan dinyatakan bahwa konflik kepentingan antara pihak principal dan pihak agent dapat dikurangi dengan cara pengawasan yang tepat pada perusahaan, sehingga semakin besar jumlah komisaris independen pada dewan komisaris akan semakin meningkatkan peran dewan komisaris dalam mengawasi dan mengontrol kinerja manajer. Untuk itu setiap perusahaan yang menerapkan corporate governance diwajibkan memiliki dewan komisaris independen. Proporsi minimum komisaris independen adalah 30% dari jumlah anggota dewan komisaris suatu perusahaan. Herawaty (2008) dalam penelitiannya menyatakan jika perusahaan memiliki komisaris independen maka laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen cenderung lebih berintegritas, karena dalam perusahaan terdapat badan yang mengawasi dan melindungi hak

pihak-pihak diluar manajemen perusahaan. Semakin besar proporsi komisaris independen dalam suatu perusahaan menunjukkan bahwa fungsi pengawasan akan menjadi lebih baik. Dengan adanya fungsi pengawasan yang lebih baik maka dapat meningkatkan kinerja keuangan. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H2 : Proporsi Dewan Komisaris Berpengaruh Positif terhadap Kinerja Keuangan**

**2.8.2 Pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap Kinerja Keuangan**

Berdasarkan teori legitimasi pengaruh masyarakat luas dapat menentukan alokasi sumber keuangan dan sumber ekonomi, perusahaan cenderung menggunakan kinerja berbasis lingkungan dan pengungkapan informasi lingkungan untuk membenarkan atau melegitimasi aktivitas perusahaan di mata masyarakat. Karena legitimasi adalah hal penting bagi organisasi, batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, serta reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analitis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan.

Mastilah (2015), dalam penelitiannya mengatakan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Asset (ROA)*. Kegiatan perusahaan dalam bidang pelestarian lingkungan akan mendatangkan sejumlah keuntungan, diantaranya ketertarikan pemegang saham dan stakeholder terhadap keuntungan perusahaan akibat pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. Hal ini berarti jika kinerja lingkungan perusahaan baik maka akan

berdampak juga pada peningkatan profitabilitas perusahaan, maka dapat dibangun hipotesis sebagai berikut:

**H3: Kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan**

